

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) dikemukakan oleh George Akerlof pada karyanya tahun 1970 "*The Market for Lemons*", dimana ia memperkenalkan tentang istilah baru yaitu informasi asimetris (*asymmetry information*). Akerlof mempelajari tentang fenomena ketidakseimbangan informasi yang terjadi tentang kualitas produk antara pembeli dan penjual dengan melakukan pengujian terhadap pasar yang ada pada mobil bekas (*used car*).

Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ketika pembeli tidak memiliki informasi terkait spesifikasi produk dan pembeli tersebut hanya memiliki persepsi umum mengenai produk yang ditawarkan, maka pembeli akan menilai semua produk dengan harga yang sama, baik produk yang dengan kualitas tinggi maupun yang berkualitas rendah, sehingga hal ini merugikan pihak penjual yang memiliki produk dengan kualitas tinggi. Kondisi ini adalah kondisi dimana salah satu pihak (penjual) yang melakukan transaksi usaha memiliki informasi lebih atas pihak lain (pembeli), keadaan ini disebut dengan *adverse selection* (Spence, 1973). Menurut Akerlof, *adverse selection* dapat dikurangi apabila pihak penjual mengkomunikasikan informasi yang terkait tentang produk mereka tawarkan berupa informasi mengenai kualitas produk, spesifikasi produk, pasar yang disasar oleh produk tersebut.

Pemikiran Akerlof (1970) dikembangkan kembali oleh Spence (1973) dalam model keseimbangan sinyal (*basic equilibrium signaling model*). Spence (1973) memberikan ilustrasi pada pasar yang ada dalam tenaga kerja (*job market*) dan mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik (*superior performance*) menggunakan informasi keuangan untuk mengirimkan sinyal kepada pasar. Dari penelitian Spence tersebut, ia juga menemukan bahwa *cost of signal* pada berita buruk (*bad news*) lebih tinggi daripada berita baik (*good news*) dan perusahaan yang memiliki berita buruk mengirimkan sinyal yang tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Hal ini mendorong manajer untuk mengungkapkan

informasi yang bersifat tertutup (*private*) untuk mengurangi asimetri informasi dengan harapan dapat mengirimkan sinyal yang baik (*good news*) tentang kinerja perusahaan ke pasar.

Gumanti (2011) mengemukakan bahwa di dalam teori sinyal, manajer (agen) atau perusahaan secara kualitas memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak luar perusahaan dan mereka menggunakan ukuran-ukuran atau fasilitas tertentu untuk menyiratkan kualitas perusahaannya. Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2002). Salah satu jenis informasi yang ditampilkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme *signalling* yang berbeda-beda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan, dan kemungkinan lain pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dan demikian juga sebaliknya.

Signaling theory melandasi pengungkapan sukarela. Sinyal ini berupa informasi mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan sinyal positif bagi perusahaan. Pengungkapan pengendalian internal (*internal control*) merupakan salah satu pengungkapan sukarela yang bisa menjadi sinyal positif bagi perusahaan kepada pengguna informasi keuangan.

Laba akuntansi juga merupakan salah satu signal dari seperangkat informasi yang tersedia di pasar modal. Menurut Suwardjono (2002), informasi dalam (*inside information*) berupa kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, strategi bisnis dan sebagainya yang tidak tersedia secara publik, akhirnya akan terefleksi dalam angka laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan. Oleh karenanya, laba merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada publik (“Teori Sinyal (Signalling Theory),” n.d.).

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals)*

engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan

kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan *return* tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. (“Teori Keagenan (Agency Theory) | Randhy Ichsan,” 2013)

2.1.3 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

2.1.4 Audit

Auditing adalah proses sistematis demi memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif atas kegiatan ekonomi suatu entitas dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditentukan serta penyampaian hasil pemeriksaan kepada pengguna yang bersangkutan, Mulyadi (2002) dalam (Aris Kurniawan, 2015).

Menurut **Whittington, O. Ray and Kurt Pann (2012)** menyatakan **bahwa**, audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang.

Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, bertanya baik di dalam maupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan memperoleh data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit (Sandy Makruf, 2017).

Pengertian lain audit menurut Sukrisno Agoes audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Nur Amaliya Hasanah, n.d.). Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kelengkapan (*Completeness*). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.
2. Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
3. Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5. Klasifikasi (*Classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6. Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
7. Pisah Batas (*Cut-Off*). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang

mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.

8. Pengungkapan (*Disclosure*). Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

(Muchlisin Riadi, 2013).

2.1.5 Laporan keuangan Tahunan

Laporan Tahunan berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Komisioner & Jasa, 2016).

Menurut OJK (2016) laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:

1. Ikhtisar data keuangan penting
2. Informasi saham (jika ada)
3. Laporan Direksi
4. Laporan Dewan Komisaris
5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik
6. Analisis dan pembahasan manajemen
7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

2.1.6 *Audit delay*

Ashton et.al (1987) mengemukakan bahwa *audit delay* adalah jumlah rentang hari dari berakhirnya tahun fiskal hingga diterbitkannya laporan opini audit (Türel, n.d.).

Menurut Dyer dan Mchugh (1975) membagi keterlambatan atau lag menjadi:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal penandatanganan laporan auditor yang tercantum dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai sampai dengan tanggal diterimanya laporan ke tahunan publikasi oleh pasar modal. (IV & McHugh, 1975).

2.1.7 *Opini Auditor*

Menurut Standar Audit (700: 16-19), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

1. *Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)*

Opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan

yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

- d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar.

Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
- c. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d. Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
- f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan.

Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

- a. Bukti kurang cukup
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup
- c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK)

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Opini tidak wajar adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Opini tidak memberikan pendapat adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat (IAPI, 2012).

Opini auditor yang dihasilkan dari proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor menjadi salah satu tambahan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Opini auditor dapat menjadi salah satu cerminan bagaimana keadaan perusahaan. Jika pendapat yang dikeluarkan oleh auditor merupakan pendapat *unqualified opinion* dapat dikatakan bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang baik sedangkan jika pendapat yang dikeluarkan oleh auditor selain *unqualified opinion* dapat dikatakan bahwa perusahaan perlu diperhatikan lebih lagi. Dan melakukan penilaian lebih lagi, keadaan atau peristiwa apa yang sedang dialami oleh perusahaan.

2.1.8 Ukuran KAP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya” (Menteri Keuangan, 2008).

Sedangkan Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Sari (2005) dalam Saphiro menyebutkan ada 4 kategori ukuran KAP, yaitu:

1. KAP Internasional

Ada 4 KAP terbesar di Amerika Serikat yang disebut KAP Internasional dengan sebutan “*The Big Four*”. Masing-masing KAP tersebut memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Big Four* di Indonesia diwakili kepentingannya oleh KAP di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perwakilan *Big Four* di Indonesia

PricewaterhouseCoopers	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Deloitte Touche Thomatsu Limited	KAP Satrio Bing Eny & Rekan
Ernst & Young (EY)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
KMPG	KAP Siddharta Widjaja & Rekan

Sumber: (“Big 4 -Accounting Firm- | Sagara’s Journey,” 2015) data diolah

2. KAP Nasional

Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran nasional karena memiliki cabang di seluruh kota besar Amerika Serikat. KAP ini memberikan pelayanan yang sama dengan KAP *Big Four*.

3. KAP Lokal dan Regional

Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regional, dan terutama terpusat diPulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan yang lain memiliki beberapa buah kantor cabang di daerah lain.

4. KAP Lokal Kecil

KAP lokal kecil adalah KAP yang memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional. Sebagian besar KAP di Indonesia tergolong ke dalam jenis KAP ini (Saphiro, 2005).

Perusahaan audit besar telah melewati berbagai macam seleksi dan standar sehingga perusahaan audit tersebut dapat masuk dalam kumpulan perusahaan audit “*Big 4*”. Dengan dilihat dari waktu tempuh audit yang dilakukan, tahun audit yang telah dilakukan, jumlah klien, pendapatan, dan jumlah cabang atau afiliasi yang tersebar di seluruh dunia.

2.1.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Suwito dan Herawaty (2005) adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun buku. Adapun hal lain yang dapat dijadikan untuk menilai ukuran perusahaan yaitu total penjualan. Ukuran perusahaan dapat menjadi nilai besar kecilnya perusahaan tersebut. Besar kecilnya usaha dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki berbagai kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar (*Bargaining Power*) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (“Pengertian Ukuran Perusahaan - SUDUT EKONOMI,” 2017).

Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung lebih memiliki sistem kerja, sistem elektronik, sistem data, komputerisasi, dan sistem pengendalian yang lebih baik dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar lebih memiliki banyak sumber daya yang harus diolah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang lebih besar juga lebih memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih banyak

dan besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tidak hanya kepentingan terhadap pemerintah dan peraturan tetapi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

2.1.10 Jumlah Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 jumlah dan komposisi direksi dalam perusahaan adalah Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Selanjutnya, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak

- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.1.11 Jumlah Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Bab III Pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris (Komisioner & Jasa, 2014).

Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi dewan komisaris sama dengan persyaratan untuk menjadi direksi.

2.1.12 Jumlah Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menerangkan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan komite audit diangkat atau diberhentikan oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris independen. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Persyaratan menjadi anggota komite audit menurut peraturan otoritas jasa keuangan adalah

1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik (Komisioner & Jasa, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai *audit delay*, baik yang dilakukan didalam negeri (Indonesia) maupun penelitian yang dilakukan diluar negeri. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*, baik faktor yang berasal dari perusahaan maupun faktor yang berasal dari auditor maupun KAP yang melakukan audit. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait tentang *audit delay*.

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel & Pengukuran	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	An Empirical Analysis of <i>Audit delay</i> <i>Ashton, Robert H., et al (1987)</i>	Variabel Dependen: <i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun Variabel Independen:	Analisis regresi linear berganda, 488 perusahaan klien U.S. offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co., yang masuk	<i>Audit delay</i> berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang mendapatkan <i>qualified opinion</i> , perusahaan yang bergerak dalam sektor lain selain sektor keuangan, bukan perusahaan publik, memiliki bulan fiskal

		<ul style="list-style-type: none"> - Total Pendapatan: Total pendapatan tahun berjalan - Klasifikasi Industri: Variabel dummy “perusahaan sektor manufaktur, perdagangan, dan minyak dan gas (industrial)” diberi angka 1, “perusahaan sektor perbankan, pendanaan, asuransi (finansial) diberi angka 0. - Status Perusahaan: Variabel dummy “perusahaan yang menjualkan sahamnya di pasar modal” diberi angka 1, lainnya diberi angka 0. - Bulan akhir tahun fiskal: Variabel dummy “perusahaan yang laporan keuangannya berakhir pada bulan Desember” diberi angka 1, lainnya diberi angka 0. - Kualitas Sistem Internal Control Perusahaan: Kualitas internal control perusahaan berdasarkan penilaian dari auditor dinyatakan dalam 5 skala (“1” tidak ada internal control sampai “5” internal control yang sangat baik) - Kompleksitas Operasional: Penilaian auditor berdasarkan , 	<p>daftar partial klien pada tahun 1982.</p>	<p>lainnya selain bulan Desember, memiliki internal control yang buruk, menggunakan teknologi pemrosesan data yang kurang kompleks, memiliki jumlah kerja audit yang lebih besar yang dilakukan setelah akhir tahun.</p> <p>Variabel yang sangat mempengaruhi <i>audit delay</i> adalah laba tahun berjalan dan opini auditor.</p>
--	--	---	--	--

		<p>jumlah dan lokasi unit operasi, dan diversifikasi jalur produk, dinyatakan dalam 5 skala (“1” sangat sederhana sampai “5” sangat kompleks)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompleksitas Keuangan: Penilaian auditor berdasarkan derajat sentralisasi keuangan dan control keuangan, dinyatakan dalam 3 skala (“1” sentralisasi sampai “3” desentralisasi) - Kompleksitas Proses Data Elektronik: Penilaian auditor yang dinyatakan dalam 4 skala (“1” tidak kompleks sampai “4” kompleks) - Kompleksitas Pelaporan: Jumlah pelaporan terpisah yang dilaporkan dalam akhir tahun fiscal, contohnya laporan konsolidasi entitas, induk dan anak perusahaan, dilaporkan pada Form 10-K financial statements; dan Surat kepatuhan hutang. - Audit dilakukan pada tanggal sementara atau tanggal akhir: Penilaian auditor dinyatakan dalam 4 skala (“1” semua pekerjaan dilakukan 		
--	--	--	--	--

		<p>setelah tahun berakhir sampai “4” kebanyakan pekerjaan dilakukan sebelum tahun berakhir”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman Audit: Jumlah tahun perusahaan menjadi client auditor. - Laba Tahun Berjalan: Variabel dummy “negatif” diberi angka 1, “positif” diberi angka 0. - Pofitabilitas: laba bersih atau rugi sebagai persentase dari total aset. - Opini Auditor: Variabel dummy, “Qualified Opinion” diberi angka 0, lainnya 1. 		
2.	<p><i>Audit delay And The Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence</i></p> <p><i>Ahmad, Raja Adzrin Raja., et al (2003)</i></p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan=Total asset) - Laba Tahun Berjalan: Variabel dummy “negatif” diberi angka 1, “positif” diberi angka 0. - Extraordinary item: Variabel dummy “perusahaan yang melaporkan extraordinary 	<p>Analisis regresi OLS</p> <p>100 perusahaan terdaftar di bursa efek Malaysia periode tahun 1996-2000.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>audit delay</i> berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang termasuk dalam industri non-keuangan, menerima opini audit “qualified opinion”, memiliki tahun fiscal diluar bulan Desember, diaudit oleh non-big 5, mengalami laba negative (kerugian), memiliki resiko lebih tinggi.</p>

		<p>item” diberi angka 1, lainnya diberi angka 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini Auditor: Variabel dummy, “Qualified Opinion” diberi angka 1, lainnya 0. - Ukuran KAP: Variabel dummy, “KAP Big 5” diberi angka 1, “Non Big 5” 0. - Tahun fiskal: Variabel dummy, “Perusahaan dengan tutup tahun fiskal dibulan Des” diberi angka 1, lainnya 0. - Jenis Industri: Variabel dummy, “industri keuangan” diberi angka 1 dan untuk “industri non keuangan” diberi angka 0. - Proporsi Hutang= Debt/Total asset. 		
3.	<p><i>Audit delay of Listed Companies: A Case of Malaysia</i></p> <p><i>Ayoib Che-Ahmad (2008)</i></p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = $\text{Log}_{10}(\text{Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun})$</p> <p>(Carslaw & Kaplan, 1991)</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Analisis regresi linear berganda,</p> <p>343 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia hingga tahun 31 Desember 1993 (purposive sampling)</p>	<p>Kepemilikan saham direksi, total asset, jumlah cabang, ukuran KAP, opini auditor, dan ROE berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Sedangkan dalam sektor non-perbankan dan sektor keuangan hanya faktor kepemilikan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi industri: Variabel dummy, “Perusahaan <i>financial</i>” diberi angka 1, “Perusahaan <i>Non- financial</i>” 0. - Ukuran Perusahaan = $\text{Log}_{10}(\text{Total asset})$ - Jumlah Cabang=$\text{Log}_{10}(\text{Total Cabang}+1$ Perusahaan Induk) - Jumlah <i>Inventory</i> dan Piutang=Total Inventory & Piutang/Total Aset - Leverage=Debt/Equity - ROE=Net Profit/Shareholders Equity - Kepemilikan saham direksi= saham yang dimiliki direktur perusahaan/saham yang beredar di pasar - Ukuran KAP: Variabel dummy, “KAP Big 4” diberi angka 1, “Non Big 4” 0. - Kesibukan perusahaan: Variabel dummy, “Perusahaan dengan tanggal laporan keuangan 31 Des-31 Mar” diberi angka 1, lainnya 0. - Opini Auditor: Variabel dummy, “Qualified Opinion” diberi angka 1, “Unqualified Opinion” diberi angka 0. 	<p>saham direksi yang berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p>
--	--	--	---

		<p>- Pergantian Auditor: Variabel dummy, “Auditor yang sama dengan periode sebelumnya” diberi angka 1, “Auditor Baru” 1.</p>		
4.	<p>An Empirical Analysis of <i>Audit delay</i> in Turkey</p> <p>Ferhan Emir Tuncay (2013)</p>	<p>Variabel Dependen: <i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan= Total asset - Ukuran KAP: Variabel dummy, “KAP Big 4” diberi angka 1, “Non Big 4” 0. - Laba Tahun Berjalan: Variabel dummy, “Positif” diberi angka 0, “Negatif” diberi angka 1. - Opini Auditor: Variabel dummy, “Unqualified Opinion” diberi angka 0, lainnya 1. - Leverage=Debt/Equity 	<p>Analisis regresi linear berganda,</p> <p>508 perusahaan yang terdaftar di BIST hingga tahun 31 Desember 2013 (purposive sampling)</p>	<p>Ukuran Perusahaan, opini auditor, dan perusahaan sedang mengalami laba berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Sedangkan leverage tidak berpengaruh negatif dan ukuran KAP tidak berpengaruh positif.</p>
5.	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit delay</i></p>	<p>Variabel Dependen: <i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p>	<p>Analisis regresi linear berganda,</p>	<p>Secara simultan ukuran perusahaan, leverage, kualitas KAP, dan jenis industri berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>

	<p>Anggradewi , Annurriszky Muflisha., et al (2014)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan=Total asset) - Leverage=Debt/Total Aset - Kualitas KAP: Variabel dummy, “KAP Big 4” diberi angka 1, “Non Big 4” 0. - Jenis Industri: Variabel dummy, “industri keuangan” diberi angka 1 dan untuk “industri non keuangan” diberi angka 0 - Independensi Komite Audit: proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar emiten dengan jumlah anggota komite audit. 	<p>128 perusahaan terdaftar di BEI periode tahun 2012 (cluster sampling)</p>	<p>Sedangkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel kualitas KAP dan jenis industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> dengan arah negatif, sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, tingkat leverage dan independensi komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p>
<p>6.</p>	<p>Corporate Governance and <i>Audit delay</i> in Nigerian Quoted Companies</p> <p>Azubike, J.U.B (2014)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Audit Time Lag = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Direksi 	<p>Analisis regresi OLS</p> <p>40 perusahaan terdaftar di bursa efek Negeria periode tahun 2010-2012 (simple random sampling)</p>	<p>Jumlah Direksi dan jumlah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Sedangkan Ukuran KAP tidak mempengaruhi <i>audit delay</i>.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Komisaris Independen - Ukuran KAP 		
7.	<p>Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan Opini Audit Terhadap <i>Audit delay</i></p> <p><i>Suarsa , Abin (2014)</i></p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas ROA=Earning after Tax/Total asset - Solvabilitas DAR=Total liabilitas/Total Aset - Opini Auditor. 	<p>Analisis regresi linear berganda.</p> <p>41 perusahaan manufaktur sektor bahan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2014 (purposive sampling)</p>	<p>Secara simultan Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Audit delay</i>.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i></p> <p>Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>.</p>
8.	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan dan Likuiditas Perusahaan Terhadap Penundaan Audit Pada Perusahaan</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Analisis regresi linear berganda,</p> <p>9 perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-</p>	<p>Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit delay</i> perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI.</p>

	<p>Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p> <p><i>Rattu, Nikita Melisa., et al (2015)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan= Log(Total asset) - Profitabilitas ROA=(Net Income/Total Aset)x 100% - Solvabilitas DER=(Total Hutang/Total Equity)x 100% - Likuiditas CAR=Total Aktiva lancar/Total hutang lancar 	<p>2014 (purposive sampling)</p>	<p>Sedangkan profitabilitas, solvabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p>
9.	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap <i>Audit delay</i> (Studi pada perusahaan LQ-45 sub-sektor bank serta property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014)</p> <p><i>Cahyanti, Dyna Nuzul., et al (2016)</i></p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan= Log (Total asset) (Rochmawati,2010) - Profitabilitas ROA=(Laba Bersih/Total Aktiva)x 100% (Riyanto, 2010) - Solvabilitas DAR=(Total Hutang/Total Aktiva)x 100% (Riyanto, 2010) 	<p>Analisis regresi linear berganda,</p> <p>11 perusahaan yang terbagung dalam LQ-45 sub-sektor bank serta property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 (purposive sampling)</p>	<p>Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Secara parsial ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>
10.	<p>Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay</i> = Tgl terbit laporan audit-Tgl terbit laporan keuangan akhir tahun</p>	<p>Analisis regresi linear berganda,</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i></p>

	<p>Terhadap <i>Audit delay</i> pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015</p> <p><i>Apriyana, Nurahman (2017)</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas ROA=(Net Income/Total Aset) - Solvabilitas DAR=(Total Hutang/Total Aset) - Ukuran Perusahaan= Log (Total asset) - Ukuran KAP: Variabel dummy, “KAP Big 4” diberi angka 1, “Non Big 4” 0. 	<p>35 perusahaan property dan real estate dan terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015 (purposive sampling)</p>	<p>Profitabilitas, solvabilitas, ukuran Perusahaan, dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Sedangkan profitabilitas dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada <i>audit delay</i>. Dan solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif.</p>
<p>11.</p>	<p>The Influence of Educational Background, Auditor Tenure, and Auditor Professional Proficiency to <i>Audit delay</i></p> <p><i>Nur Asni., et al (2017)</i></p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Audit delay:</i> Variabel dummy, “Waktu audit ≤ 2 bulan” diberi angka 0, “Waktu audit ≥ 2 bulan” diberi angka 1.</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang Pendidikan Auditor: Presentase auditor yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. - Auditor Tenure: Presentase jumlah auditor yang melakukan audit dalam 2 tahun berurutan 	<p>Analisis regresi linear berganda,</p> <p>13 pemerintah lokal di Sulawesi Tenggara yang menyampaikan laporan keuangannya dalam LKPD tahun 2012-2014.</p>	<p>Latar belakang pendidikan auditor dan audit tenure berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>Sedangkan kemahiran professional auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</p>

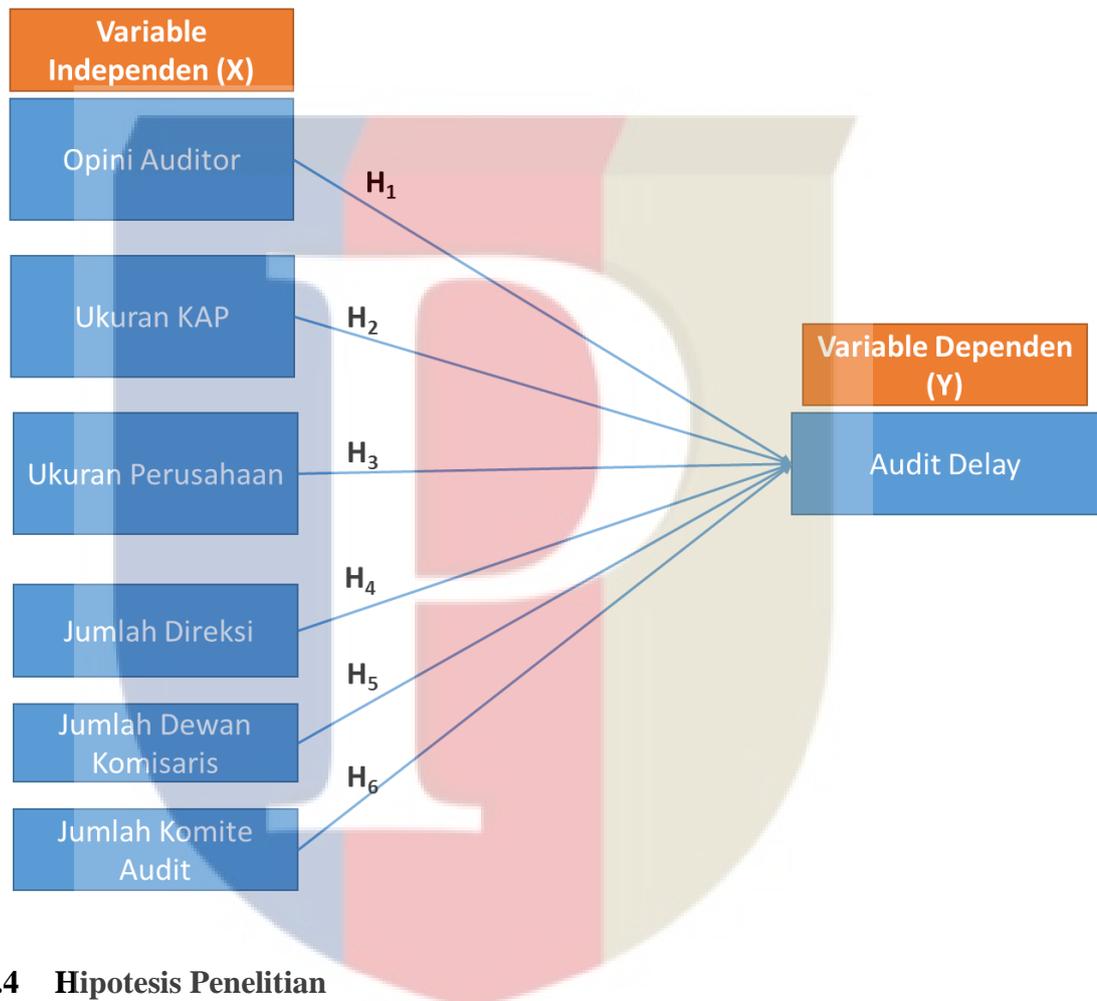
		<p>untuk 1 entitas dengan 1 team audit.</p> <p>- Kemahiran profesional auditor: Presentase jumlah auditor yang memiliki sertifikasi professional untuk total auditor dalam 1 team audit.</p>		
--	--	---	--	--



2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Opini Auditor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashton et.al pada tahun 1987 pada perusahaan klien U.S. offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co., tahun 1982 diketahui bahwa perusahaan yang mendapat opini *qualified* memiliki rentangan

waktu *audit delay* yang lebih lama. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mendapat opini *qualified* menyatakan sinyal yang buruk bagi investor, laporan audit yang tidak baik menandakan keadaan perusahaan yang sedang dalam masalah. Selain itu menurut Ashton bisa saja perusahaan tersebut melakukan proses negosiasi pada auditor untuk melakukan perubahan terhadap opini auditnya dengan cara meminta auditor untuk melakukan proses audit yang lebih teliti dan cermat lagi. Maka dari itu hal inilah yang membuat rentangan waktu untuk auditor menyelesaikan waktu auditnya menjadi lebih lama.

Ashton (1987) menyimpulkan pula bahwa opini audit menjadi salah satu fungsi untuk menginvestigasi *audit delay*. Menurut Bomber et.al (1993) dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayoib Che-Ahmad menyatakan bahwa *qualified opinion* biasanya tidak diterbitkan sampai auditor menghabiskan waktu dan tenaga yang ekstra (tambahan) dalam melakukan prosedur audit yang dilakukan. Selain itu, perusahaan selalu melihat *qualified opinion* sebagai "berita buruk (*bad news*)", yang membuat perusahaan mungkin tidak menanggapi permintaan auditor segera. Hal ini merupakan suatu gejala konflik manajemen-auditor yang juga akan meningkatkan *audit delay* (Che-ahmad, 1998). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah

H₁: Opini Auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4.2 Ukuran KAP

Penelitian yang dilakukan oleh Ayoib Che-Ahmad (2008) menyatakan bahwa ukuran dari perusahaan audit mempengaruhi *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan audit besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, mungkin saja perusahaan audit besar memiliki staff yang lebih berkualitas dan memadai dibandingkan dengan perusahaan audit yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan audit besar cenderung memiliki sistem yang baik dalam mengembangkan keahlian spesialisasi industri tertentu pada setiap tim auditnya, maka hal inilah yang

membuat pekerjaan audit yang dilakukan menjadi lebih efisien. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggradewi et.al (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *audit delay* dengan arah koefisien yang negatif. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan audit besar cenderung memiliki klien yang lebih besar dan lebih kompleks, serta membutuhkan kerja audit yang lebih besar, maka dari itu waktu audit yang dibutuhkan oleh perusahaan audit yang lebih besar pun menjadi lebih panjang dibandingkan perusahaan audit yang lebih kecil (Anggradewi, 2014). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah

H₂: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4.3 Ukuran Perusahaan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dyna Chayanti (2016) pada 11 perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 sub sektor real estate dan propoerti yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2010-2014 menyatakan bahwa ukuran besar kecilnya perusahaan mempengaruhi lamanya proses audit yang dilakukan. Dimana pengaruh yang dihasilkan dari keduanya adalah berpengaruh negatif. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya, dikarenakan perusahaan yang lebih besar telah memiliki sistem kerja dan penganadalian yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferhan Emir (2013) yang meneliti tentang *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di bursa Turki tahun 2013, yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki *audit delay* yang lebih pendek dikarenakan perusahaan besar lebih memiliki sumber daya, staff-akuntansi yang lebih banyak, sistem informasi yang lebih canggih, dan sistem internal control yang lebih kuat; sehingga membuat auditor tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukan *substantive test*, karena auditor dapat bersandar pada *test of control*, yaitu control yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan besar

memiliki sejumlah analisis keuangan yang cukup banyak untuk membantu menyusun laporan keuangan tahunan yang tepat waktu. Yang lainnya adalah perusahaan besar berusaha untuk mempertahankan reputasinya di mata publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raja Adzrin (2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini bisa saja disebabkan, bahwa perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Maka hal inilah yang menyebabkan perusahaan besar memiliki *audit delay* yang lebih panjang. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4.4 Jumlah direksi

Jumlah anggota direksi merupakan salah satu syarat perusahaan dapat dikatakan melakukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azubike (2013) dengan sampel perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek di Negeria tahun 2010-2012 menyatakan bahwa jumlah direksi berpengaruh terhadap *audit delay*. Jumlah direksi cenderung mempengaruhi struktur pengambilan keputusan dalam perusahaan, khususnya keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh perusahaan. Dimana jumlah direksi dianggap membuat perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah

H₄: Jumlah Direksi berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Jumlah Direksi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4.5 Jumlah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Tugas dan tanggungjawab dewan komisaris salah satunya adalah mengawasi direktur dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta menggantikan tugas dan tanggungjawab direktur apabila direktur berhalangan melakukan tugasnya.

Variabel jumlah dewan komisaris merupakan variable baru yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan melihat tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris dapat diartikan bahwa keberadaan dewan komisaris merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai seberapa baik tata kelola yang dilakukan dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan fungsi dewan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja direksi dan memberikan nasehat dalam pengambilan keputusan, membuat perusahaan makin kaya dalam mengambil keputusan yang terbaik di perusahaan. Kecenderungan yang mungkin terjadi adalah perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih besar, lebih memiliki struktur pengambilan keputusan yang baik, dan struktur kerja yang lebih baik, maka dari itu akan mempersingkat waktu *audit delay* yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah

H₅: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4.6 Jumlah Komite Audit

Komite Audit berfungsi sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan (“Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Resiko dan GCG |,” n.d.).

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah menilai efektivitas sistem pengendalian internal, menilai efektivitas auditor eksternal, menilai efektivitas tugas auditor internal, komite audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pelaksanaan Internal (SPI). Variabel jumlah komite audit merupakan

variable terbaru dalam penelitian ini. Dengan melihat fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dinyatakan bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin baik pula pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan, dan semakin efektif kinerja auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan. Kemungkinan perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang lebih besar memiliki jangka waktu *audit delay* yang lebih pendek. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah

H₀: Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

H_a: Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

